

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Pembangunan Berkelanjutan

2.1.1 Konsep Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan pertama kali diperkenalkan secara luas oleh *World Commission on Environment and Development (WCED,1984)* dalam *Our Common Future* yang didefinisikan sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya. Emil Salim (1990) menyatakan bahwa pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia. Dimana tujuan dari pembangunan berkelanjutan ialah menciptakan kesejahteraan yang merata dengan memperhatikan berbagai aspek untuk kebutuhan setiap generasi masa kini dan generasi masa mendatang. Azis dalam bukunya menyatakan bahwa terdapat tiga hal yang tumbuh bersama-sama dalam pembangunan berkelanjutan, yaitu dalam aspek ekonomi, sosial dan lingkungan yang saling mempengaruhi antar ketiganya, seperti yang tergambar dalam tabel berikut.

Tabel II. 1 Matriks Keterkaitan dalam Pembangunan Berkelanjutan

Dari/Ke	Ekonomi	Sosial	Lingkungan
Ekonomi	Pengentasan Rakyat Miskin	Dampak Terkait	Dampak Terkait

Dari/Ke	Ekonomi	Sosial	Lingkungan
Sosial	Dampak Terkait	Pembangunan Manusia	Dampak Terkait
Lingkungan	Dampak Terkait	Dampak Terkait	Pelestarian Ekosistem

Sumber: Iwan J. Azis dkk, 2010

Azis dkk (2010) menjelaskan bahwa ketika terdapat upaya untuk meringankan rakyat miskin akan berdampak pada aspek ekonomi dengan mempertimbangkan aspek sosial dan lingkungan. Begitu juga dengan pembangunan manusia akan berdampak pada aspek sosial dan akan mempengaruhi aspek ekonomi dan lingkungan. Berdasarkan hal ini dapat diketahui bahwa dalam pembangunan berkelanjutan antara ketiga aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial tidak dapat dipisahkan. Dimana ketiga aspek ini akan saling mempengaruhi dan saling berkaitan.

Parman dkk (1997) dalam Rahardian (2016) mengungkapkan terdapat 5 *alternative* pengertian pembangunan berkelanjutan. (1) Suatu kondisi dikatakan berkelanjutan jika utilitas yang diperoleh masyarakat tidak berkurang sepanjang waktu dan konsumsi menurut sepanjang waktu. (2) Keberlanjutan adalah kondisi dimana sumber daya alam dikelola sedemikian rupa untuk memelihara kesempatan produksi dimasa mendatang. (3) Keberlanjutan adalah kondisi dimana sumber daya alam tidak berkurang sepanjang waktu. (4) Keberlanjutan adalah kondisi dimana sumber daya alam dikelola untuk mempertahankan produksi jasa sumber daya alam, dan (5) keberlanjutan adalah adanya kondisi keseimbangan dan daya tahan (*resilience*) ekosistem terpenuhi.

Selain definisi di atas, Haris (2000) dalam Rahardian (2016) melihat bahwa konsep keberlanjutan dapat dilihat melalui tiga aspek, (1) keberlanjutan ekonomi yang diartikan sebagai pembangunan yang mampu menghasilkan barang dan jasa secara kontinu untuk memelihara keberlanjutan pemerintahan dan menghindari terjadinya ketidakseimbangan sektoral yang dapat merusak produksi pertanian dan industri. (2) keberlanjutan lingkungan dimana sistem keberlanjutan secara lingkungan harus mampu memelihara sumber daya yang stabil, menghindari eksploitasi sumber daya

alam dan fungsi penyerapan lingkungan. (3) keberlanjutan sosial diartikan sebagai sistem yang mampu mencapai kesetaraan, penyedia layanan sosial termasuk kesehatan, pendidikan, gender dan akuntabilitas politik.

Terdapat 17 Tujuan pembangunan berkelanjutan, salah satunya ialah tujuan SDGs nomor 8 (delapan) yaitu mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, penyerapan tenaga kerja penuh dan produktif serta pekerjaan yang layak bagi semua. Dimana untuk mencapai tujuan tersebut terdapat beberapa target yang dilakukan salah satunya ialah pada tahun 2030 merancang dan menerapkan kebijakan yang mendukung pariwisata berkelanjutan yang mampu menciptakan lapangan kerja.

2.1.2 Prinsip Pembangunan Berkelanjutan

Terdapat lima prinsip pembangunan berkelanjutan yang dijabarkan dalam *United Conference on Environment and Development* (UNITED), 1992 diantaranya ialah:

1. Keadilan antargenerasi (*integrated equity*)
2. Keadilan dalam satu generasi (*intragenerational equity*)
3. Prinsip pencegahan dini (*precautionary principle*)
4. Perlindungan keanekaragaman hayati (*conservation of biological diversity*)
5. Internalisasi biaya lingkungan dan mekanisme insentif (*internalisation of environment cost and incentive mechanism*).

Berdasarkan pemahaman - pemahaman para ahli di atas, dapat diketahui bahwa pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memperhatikan aspek lingkungan, ekonomi dan sosial yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerataan pembangunan dengan mempertimbangkan keadaan sosial, ekonomi, dan lingkungan di masa yang akan datang.

2.2 Pariwisata

2.2.1 Konsep Pariwisata

Pada Undang-Undang No 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, menjelaskan definisi pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah. Kegiatan wisata terdiri atas beberapa komponen utama:

1. **Wisata**
Merupakan kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya Tarik wisata yang dikunjungi, dalam waktu sementara.
2. **Wisatawan**
Adalah orang yang melakukan wisata.
3. **Pariwisata**
Adalah berbagai macam kegiatan wisata didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, dan pemerintah.
4. **Kepariwisataan**
Adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multi disiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan pengusaha.
5. **Usaha pariwisata**
Usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
6. **Pengusaha pariwisata**
Orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
7. **Industri pariwisata**
Kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata

2.2.2 Sarana dan Prasarana Penunjang Pariwisata

Menurut Karyono (1997) dalam Wulan dan Khadiyanto (2013) menyebutkan bahwa faktor utama dalam pengembangan kepariwisataan adalah pelayanan. Dimana salah satu faktor yang menentukan pelayanan dalam pengembangan pariwisata adalah kesiapan dari sarana dan prasarana wisata.

a. Sarana pariwisata

Merupakan gabungan dari berbagai aktivitas yang berkaitan dengan upaya memberikan kepuasan terhadap wisatawan (Wulan dan Khadiyanto, 2013).

b. Prasarana Pariwisata

Merupakan semua fasilitas yang memungkinkan proses perekonomian dapat berjalan dengan lancar sehingga dapat memudahkan masyarakat dan wisatawan yang membutuhkan (Wulan dan Khadiyanto, 2013).

2.2.3 Standar Kelayakan Menjadi Daerah Tujuan Wisata

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 dalam pengembangan kepariwisataan harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1) Prasarana Umum

1. Jaringan listrik dan lampu penerangan
2. Jaringan air bersih
3. Jaringan telekomunikasi
4. *System* pembuangan air limbah

2) Fasilitas umum

1. Fasilitas keamanan, seperti pemadam kebakaran, fasilitas tanggap bencana di destinasi yang rawan bencana.

2. Fasilitas keuangan dan perbankan, seperti anjungan tunai mandiri dan tempat penukaran uang.
 3. Fasilitas bisnis, seperti kios, kelontong dan toko obat 24 jam, warung internet, telepon umum, sarana penitipan dan penyimpanan barang,
 4. Fasilitas kesehatan, berupa poliklinik 24 jam dan fasilitas pertolongan pertama pada kecelakaan.
 5. Fasilitas sanitasi dan kebersihan, seperti toilet umum, jasa binatu, dan tempat sampah.
 6. Fasilitas khusus bagi penderita cacat fisik, anak-anak dan lanjut usia,
 7. Fasilitas rekreasi, seperti fasilitas peristirahatan, fasilitas bermain anak-anak, fasilitas olahraga, dan fasilitas pejalan kaki.
 8. Fasilitas lahan parkir, dan
 9. Fasilitas ibadah.
- 3) Fasilitas pariwisata
1. Fasilitas akomodasi
 2. Fasilitas rumah makan
 3. Pusat informasi pariwisata
 4. Polisi pariwisata dan satuan tugas pariwisata
 5. Toko cindramata
 6. Petunjuk arah/papan informasi
 7. Bentuk bentang alam

Tabel II. 2 Standar Kelayakan Menjadi Daerah Tujuan Wisata

No	Kriteria	Standar minimal
1	Objek	Terdapat salah satu dari unsur alam, sosial ataupun budaya
2	Akses	Adanya jalan, adanya kemudahan rute, tempat parkir, dan harga parkir yang terjangkau

No	Kriteria	Standar minimal
3	Akomodasi	Adanya pelayanan penginapan (hotel, wisma, losmen, dan lain-lain)
4	Fasilitas	Agen perbelanjaan, pusat informasi, salon, fasilitas kesehatan, pemadam kebakaran, hydrant, TIC (<i>Tourism Information Center</i>), pemandu wisata, plang informasi, petugas yang memeriksa masuk dan keluarnya wisatawan
5	Transportasi	Adanya transportasi local yang nyaman, variatif yang menghubungkan akses masuk
6	<i>Catering servis</i>	Adanya pelayanan makanan dan minuman (restoran, rumah makan, warung nasi dan lain-lain)
7	Aktivitas rekreasi	Terdapat sesuatu yang dilakukan di lokasi wisata, seperti berenang, terjun payung, berjemur, berselancar, jalan-jalan dan lain-lain
8	Perbelanjaan	Adanya tempat pembelian barang-barang umum
9	Komunikasi	Adanya televisi, telepon umum, radio, sinyal telephone, seluler, penjual voucher,
10	System perbankan	Adanya bank
11	Kesehatan	Poliklinik umum/jaminan ketersediaan pelayanan yang baik untuk penyakit yang mungkin diderita wisatawan
12	Keamanan	Adanya jaminan keamanan (petugas khusus keamanan, polisi wisata, pengawas pantai, rambu-rambu perhatian, pengarah kepada wisatawan)
13	Kebersihan	Tempat sampah dan rambu-rambu peringatan tentang kebersihan
14	Sarana ibadah	Terdapat salah satu sarana ibadah bagi wisatawan
15	Sarana pendidikan	Terdapat salah satu sarana pendidikan formal
16	Sarana olahraga	Terdapat alat dan perlengkapan untuk berolahraga

Sumber : Lothar A.Kreck dalam Agusbushoro (2014)

Berdasarkan PERMEN LHK No. P.18/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2019 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa. Bangunan sarana wisata alam dan fasilitas yang menunjang kepariwisataan harus memperhatikan:

1. Kaidah konservasi;
2. Ramah lingkungan;
3. Sistem sanitasi yang memenuhi standar kesehatan manusia dan kesejahteraan lingkungan;
4. Efisien dalam penggunaan lahan;
5. Memiliki teknologi pengolahan dan pembuangan limbah;
6. Konstruksi yang memenuhi persyaratan bagi keselamatan;
7. Hemat energi;
8. Berpedoman pada ketentuan teknis yang menyangkut keselamatan dan keamanan dari instansi yang berwenang sesuai dengan rencana pengelolaan dan *siteplan*.

Pasal 14 menjelaskan bahwa "Bahan bangunan untuk pembangunan sarana wisata alam dan fasilitas yang menunjang kepariwisataan disesuaikan dengan kondisi setempat dan diutamakan menggunakan bahan-bahan dari daerah setempat". Jika tidak terdapat di daerah setempat, dapat dipergunakan bahan bangunan dari luar daerah setempat yang tidak merusak kelestarian lingkungan.

2.2.4 Sistem dan Elemen Pariwisata

Mill dan Morisson (1985) dalam Wulan dan Khadiyanto (2013) menggambarkan pariwisata sebagai suatu sistem yang saling terkait satu sama lain. Elemen pariwisata dalam sistem pariwisata terdiri dari wisatawan, promosi, atraksi wisata, pelayanan akomodasi dan transportasi. Kemudian elemen tersebut dibagi menjadi 2 yaitu permintaan dan penawaran. Permintaan pariwisata terdiri dari masyarakat yang mempunyai kemampuan dan keinginan untuk melakukan wisata, sedangkan penawaran terdiri dari atraksi daya tarik wisata, transportasi, informasi dan promosi, serta pelayanan yang ada di lokasi wisata.

2.3 Pariwisata Berkelanjutan

2.3.1 Konsep Dasar Pariwisata Berkelanjutan

Pariwisata berkelanjutan merupakan salah satu konsep pengembangan industri pariwisata dengan tetap mengacu pada keseimbangan terhadap aspek ekonomi, sosial dan lingkungan (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2012 dalam Sulistyadi dkk, 2019). Hal ini selaras dengan tujuan dari pariwisata berkelanjutan yang dikemukakan oleh Sharpley, 2006 dalam Sulistyadi dkk, 2019 menyatakan bahwa tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu untuk mencapai keseimbangan antara lingkungan pariwisata, kebutuhan lokal masyarakat, dan kebutuhan wisatawan. Dalam hal ini, tujuan pembangunan berkelanjutan adalah :

1. Tujuan Pembangunan

Berfokus pada pertumbuhan ekonomi melalui komponen dasar untuk pembangunan yang berfokus pada kepuasan kebutuhan dasar masyarakat.

2. Tujuan Lingkungan/Berkelanjutan

Perlindungan dan pelestarian terhadap lingkungan.

Menurut Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (2014) pariwisata berkelanjutan merupakan kegiatan berwisata dengan memperhitungkan secara penuh dampak ekonomi, sosial dan lingkungan sekarang dan yang akan datang, menjawab kebutuhan pengunjung, industri pariwisata, lingkungan dan komunitas tuan rumah. Berdasarkan beberapa definisi tersebut dapat diketahui bahwa pariwisata berkelanjutan merupakan salah satu konsep pemanfaatan pariwisata dengan memperhatikan secara penuh dampak ekonomi, sosial dan lingkungan.

Menurut Sulistyadi dkk, 2019 menyatakan bahwa Pengembangan pariwisata berkelanjutan akan memberikan manfaat diantaranya ialah :

1. Penciptaan lapangan usaha

Penerapan dan pengembangan pariwisata berkelanjutan akan memberikan peluang usaha baru yang akan memberikan kontribusi positif terhadap masyarakat setempat. Adanya pusat-pusat perbelanjaan yang menjual cinderamata, dan usaha-usaha mikro lainnya merupakan bentuk berkembangnya

peluang usaha. Dimana hal ini akan meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Penciptaan lapangan pekerjaan yang layak

Potensi besar dalam pengembangan kawasan pariwisata berkelanjutan adalah mengurangi pengangguran dan penciptaan lapangan pekerjaan yang layak bagi masyarakat. misalnya, dalam pengelolaan lingkungan akan membutuhkan tenaga kerja dari masyarakat. selain itu, akan meningkatkan peluang industri - industri rumah tangga dalam lokasi wisata.

3. Daya tarik wisata dan penciptaan pasar

Daerah tujuan wisata yang akan dikelola dengan baik akan memberikan kesan pada pengunjung. Sehingga akan meningkatkan daya tarik wisatawan.

4. Pajak pendapatan

Menurut Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (2012:33-34) usaha legal yang memenuhi kewajiban fiskal dan hukum merupakan sumber pendapatan untuk pemerintah. Tahap selanjutnya pemerintah akan menggunakan dana tersebut untuk pembangunan.

Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan akan memberikan manfaat yang besar. Dimana dalam hal ini, pengembangan pariwisata mampu memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan daerah, dan mampu mensejahterakan masyarakat dengan mengurangi tingkat pengangguran dan penciptaan lapangan pekerjaan yang layak.

2.3.2 Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Prinsip *Sustainable Tourism*

Dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan (*sustainable Tourism*) ada beberapa faktor yang mempengaruhi, diantaranya ialah :

1. Perkembangan Demografi

Demografi merupakan studi mengenai populasi manusia yang meliputi ukuran populasi struktur usia, distribusi geografis, dan distribusi pendapatan dan statistik lainnya (Kotler, 2012 dalam Sulistyadi, 2019). Perkembangan demografi akan

mempengaruhi pembangunan berkelanjutan. seperti misalnya peningkatan jumlah penduduk akan mempengaruhi peningkatan kebutuhan akan sumber daya alam yang lebih besar. Seperti yang diungkapkan oleh Hitt, Ireland dan Hoskisson dkk, 2007 dalam Rustyadi dkk, 2019 bahwa tingkat pertumbuhan populasi yang cepat pada suatu negara akan semakin mengurangi sumber daya alam dan mengurangi standar hidup penduduknya. Faktor yang kedua adalah pendidikan. Taraf pendidikan masyarakat yang lebih tinggi akan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam perwujudan pembangunan berkelanjutan. masyarakat akan lebih berpartisipasi dalam menghadapi isu - isu pembangunan berkelanjutan.

2. Perkembangan Ekonomi

Perkembangan ekonomi merupakan hal yang mempengaruhi kinerja masyarakat dan pemerintah dalam pengembangan kawasan pariwisata berkelanjutan. Dimana perkembangan ekonomi ini mampu mencerminkan kinerja perusahaan dan masyarakat yang berkaitan dengan berbagai aspek.

3. Perkembangan Politik Dan Hukum

Perkembangan politik dan hukum berkaitan dengan peluang - peluang dan usaha-usaha yang dilakukan oleh berbagai pihak seperti masyarakat dan pemerintah untuk mendapatkan sumber daya yang diinginkan. Dan terdapat pengawasan terhadap badan hukum dan undang-undang.

4. Perkembangan Sosial Budaya

Menurut Hit, Ireland & Hoskisson dkk, 2007 dalam Rustyadi dkk, 2019 menyatakan bahwa segmen sosial budaya berkaitan dengan sikap-sikap dan nilai kultural suatu masyarakat. Karena sikap dan nilai membentuk pondasi masyarakat, dimana masyarakat selalu ikut serta mendorong kondisi - kondisi dan perubahan demografis, ekonomi, politik dan teknologi.

Prinsip-prinsip keberlanjutan mengacu keseimbangan terhadap aspek-aspek lingkungan, ekonomi dan sosial budaya (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2012).

2.3.3 Prinsip-prinsip Dalam Pariwisata Berkelanjutan

Pembangunan pariwisata berkelanjutan pada dasarnya adalah usaha pengembangan dan pemanfaatan pariwisata dengan tetap memperhitungkan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan untuk generasi masa kini namun tetap memikirkan kebermanfaatannya bagi generasi yang akan datang. Sulistyadi, 2012 menyatakan terdapat tiga prinsip utama yang direkomendasikan, yaitu *community based tourism*, *conservation oriented*, dan *carrying capacity*.

2.3.4 Aspek Penting Dalam Pariwisata Berkelanjutan

Sulistyadi dkk, 2019 menyatakan beberapa aspek penting yang menjadi pertimbangan dalam Pariwisata Berkelanjutan :

1. Aspek Ekonomi

Memastikan kegiatan ekonomi jangka panjang yang layak, memberikan manfaat sosial ekonomi kepada semua *stakeholder* dengan adil, seperti pekerjaan tetap, kesempatan mendapatkan penghasilan atau membuka usaha dan pelayanan sosial kepada masyarakat lokal, serta membantu mengurangi kemiskinan.

2. Aspek Lingkungan

Memanfaatkan secara optimal sumber daya lingkungan yang merupakan elemen kunci dalam pengembangan pariwisata, mempertahankan proses ekologi dan turut andil dalam melestarikan warisan alam dan keanekaragaman hayati dalam destinasi wisata.

3. Aspek Sosial Budaya

Menghormati keaslian sosial budaya masyarakat setempat, melestarikan nilai-nilai warisan budaya dan adat yang mereka bangun, dan berkontribusi untuk meningkatkan rasa toleransi serta pemahaman budaya

2.3.5 Organisasi Tata Kelola Bidang Pariwisata

Organisasi tata kelola destinasi pariwisata menjadi suatu hal yang penting untuk diperhatikan dimana organisasi tata kelola menjadi tujuan utama destinasi pariwisata dalam mengelola pariwisata (Junaid, 2015 dalam Pearce, 2015). Organisasi tata kelola dapat didasarkan pada tingkatan provinsi, kabupaten/kota, wilayah administratif, atau berdasarkan pada daya tarik wisata yang membutuhkan pengelolaan yang profesional yang selanjutnya menunjang destinasi wisata. proses pembentukan organisasi tata kelola destinasi pariwisata tergantung pada peran dan fungsi pemerintah daerah melalui Dinas Pariwisata yang dapat mendorong masyarakat untuk aktif terlibat dalam kegiatan organisasi tata kelola tersebut (Junaid, 2019). Pearce (2015) dalam Junaid (2019) mengemukakan fungsi dan peran organisasi tata kelola destinasi sebagai berikut :

1. Organisasi tata kelola membantu dalam memasarkan, melakukan branding dan memosisikan suatu destinasi.
2. Membantu mengembangkan dan mengelola produk yang dimiliki suatu destinasi.
3. Melakukan perencanaan, implementasi, dan evaluasi program kerja yang berkaitan dengan pariwisata suatu destinasi.
4. Mendorong masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan pariwisata melalui peran fasilitator.
5. Berperan dalam proses pemberian informasi kepada wisatawan serta membantu masyarakat dalam kegiatan sosialisasi urgensi dan manfaat pariwisata bagi masyarakat.

A. Fungsi dan Peranan Pemerintah dalam Dunia Pariwisata

Mauna, 2011 menyatakan bahwa fungsi - fungsi menunjukkan rangkaian kegiatan yang diusulkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Peranan merupakan tempat tertentu yang ditentukan untuk diduduki oleh seorang dalam suatu proses pencapaian tujuan. Kemenpar, 2012 menjelaskan terkait fungsi pokok pemerintah daerah dalam kegiatan pariwisata sebagai berikut :

1. Pelaksanaan dan penanggung jawab penuh terhadap segala kegiatan kepariwisataan yang ada di daerahnya serta hal - hal lain yang berhubungan dengan unsur pariwisata;
2. Pelaksana dan penanggung jawab dari upaya pengembangan sektor kepariwisataan yang ditugaskan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Berdasarkan Permen RI. No. 28 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Konservasi Pelestarian Alam pasal 12 dijelaskan bahwa penyelenggaraan KSA dan KPA dilakukan oleh pemerintah provinsi atau pemerintah Kabupaten/Kota. Pasal 43 terkait kerja sama penyelenggaraan KSA dan KPA bahwa penyelenggaraan KSA dan KPA dapat dikerjasamakan dengan badan usaha, lembaga internasional, atau pihak lainnya. Kerja sama dilakukan untuk :

- a. Penguatan fungsi KSA dan KPA; dan
- b. Kepentingan pembangunan strategis yang tidak dapat dielakan.

Selain itu, berdasarkan Permen RI No. 28 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Konservasi Pelestarian Alam pasal 48 disebutkan bahwa, pendanaan pengelolaan KSA dan KPA bersumber pada APBN atau APBD dan sumber dana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.3.6 Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat

Pasal 49 pada Permen RI No. 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Konservasi Pelestarian Alam ayat 1 dijelaskan bahwa pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota harus memberdayakan masyarakat di sekitar KSA dan KPA dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya. Pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan KSA dan KPA meliputi pengembangan kapasitas masyarakat dan pemberian akses pemanfaatan KSA dan KPA. Pemberdayaan masyarakat ini dilakukan melalui :

1. Pengembangan desa konservasi
2. Pemberian izin untuk memungut hasil hutan bukan kayu di zona atau blok pemanfaatan, izin pemanfaatan tradisional, serta izin perusahaan jasa wisata alam;
3. Fasilitasi kemitraan pemegang izin pemanfaatan hutan dengan masyarakat.

Pada pasal 50 Permen RI No. 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Konservasi Pelestarian Alam menjelaskan bahwa masyarakat berhak mengetahui rencana pengelolaan KSA dan KPA, memberi informasi, saran, serta pertimbangan dalam penyelenggaraan KSA dan KPA, melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan KSA dan KPA, serta menjaga dan memelihara KSA dan KPA.

2.4 Partisipasi Masyarakat

2.4.1 Pengertian Partisipasi Masyarakat

Pengertian dan prinsip partisipasi masyarakat menurut Ach. Wazir Ws, dkk (dalam Akhmaddhian dan Fathanudien, 2015) partisipasi diartikan sebagai keterlibatan seseorang secara sadar ke dalam interaksi sosial dalam situasi tertentu. Pengertian ini sejalan dengan pendapat Isbandi (dalam Akhmaddhian dan Fathanudien, 2015) yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat merupakan keikutsertaan masyarakat dalam proses mengidentifikasi masalah dan potensi yang ada dalam masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang *alternative* solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.

2.4.2 Bentuk Partisipasi Masyarakat

Menurut Cohen dan Uphoff (1980) dalam (Ramadhan dan Khadyanto,2014) berpendapat bahwa bentuk partisipasi masyarakat dapat dibagi ke dalam 4 tahap partisipasi masyarakat. diantaranya ialah :

1. Tahap pengambilan keputusan (*decision making*)
Membuat beberapa pilihan dari banyak kemungkinan dan menyusun rencana-rencana yang bisa dilaksanakan dan atau layak untuk dioperasikan.
2. Tahap implementasi (*implementation*)
Menjelaskan siapa dan bagaimana mereka berpartisipasi.
Tahapan ini dibagi ke dalam 3 bentuk, yaitu :
 - a. Bentuk partisipasi dalam kontribusi sumber daya (*resource contribution*);
 - b. Partisipasi dalam bentuk terlibat dalam administrasi dan;
 - c. Koordinasi kegiatan yang menyangkut tenaga kerja, biaya, dan informasi.
3. Partisipasi dalam bentuk terlibat dalam menikmati keuntungan (*benefit*)
pada tahap ini terdiri dari 3 bentuk, yaitu :
 - a. Menikmati keuntungan material (*material*);
 - b. Menikmati keuntungan sosial (*social*);
 - c. Menikmati keuntungan personal.
4. Tahap partisipasi dalam evaluasi
Pada tahap ini bagi menjadi 2, yaitu :
 - a. Evaluasi langsung;
 - b. Evaluasi tidak langsung.

Menurut Cohen dan Uphoff (1979) dalam Dwiningrum (2011). Partisipasi masyarakat dapat dilihat melalui beberapa tahap:

1. Tahap pengambilan keputusan
Partisipasi masyarakat pada tahap pengambilan keputusan ini penting untuk dilakukan, karena masyarakat dituntut untuk ikut menentukan arah dan orientasi pembangunan.
2. Partisipasi dalam pelaksanaan/implementasi

Partisipasi pada tahap implementasi suatu program meliputi, menggerakkan sumber daya dan dana, kegiatan administrasi dan koordinasi, serta penjabaran program.

3. Partisipasi dalam menerima manfaat

Partisipasi dalam menerima manfaat ini tidak terlepas dari kualitas dan kuantitas dari hasil pelaksanaan program yang bisa di capai. Dari segi kualitas, keberhasilan dari suatu program akan ditandai dengan adanya peningkatan output, sedangkan dari segi kualitas dapat dilihat seberapa besar persentase keberhasilan program yang dilaksanakan.

4. Partisipasi dalam evaluasi

Partisipasi pada tahap evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan program telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan atau justru terjadi penyimpangan.

Menurut Slamet dalam Mardikanto, dkk, 2013. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan ditentukan oleh tiga unsur pokok. Diantaranya ialah, adanya kesempatan yang diberikan masyarakat untuk berpartisipasi, adanya kemauan masyarakat untuk berpartisipasi, dan adanya kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi. Menurut (Sadono, 2012) faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat terdiri dari faktor dari dalam masyarakat (internal) dan faktor dari luar masyarakat (eksternal). Faktor-faktor yang mempengaruhi peran serta masyarakat dalam pengelolaan Taman Nasional Way Kambas adalah :

1. Faktor internal, yaitu umur, jenis pekerjaan, pendidikan, tingkat penghasilan dan lama tinggal,
2. Faktor eksternal, yaitu semua stakeholder yang mempunyai pengaruh terhadap program/kegiatan pengelolaan Taman Nasional misalnya : LSM, pemda, dan swasta.

2.5 *Community Based Tourism*

2.5.1 *Konsep Community Based Tourism*

Pada Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata pasal 1 ayat 6 dijelaskan bahwa destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan. Berdasarkan hal ini diketahui bahwa masyarakat merupakan salah satu komponen penting dalam kepariwisataan. Dimana dalam hal ini, masyarakat dan pariwisata merupakan hal yang saling berkaitan dan tidak saling terpisahkan. Dogra dan gupta (2012) menyebutkan bahwa masyarakat memiliki posisi strategis dalam suatu destinasi pariwisata. Pariwisata tanpa adanya masyarakat tidak akan berkembang, untuk itu dalam kepariwisataan perlu untuk mempertimbangkan elemen-elemen masyarakat. serta keberlanjutan destinasi pariwisata sangat tergantung dari tingkat keterlibatan masyarakat dalam pembangunan dan pengembangan destinasi pariwisata.

Peran masyarakat dalam pengembangan pariwisata sangatlah penting. Adanya inovasi-inovasi baru yang dilakukan oleh masyarakat akan mampu meningkatkan masa umur kawasan pariwisata itu sendiri. Tosun dan Timothy (2003) ditegaskan bahwa aspek penting dalam pariwisata adalah penekanan pada pengembangan pariwisata berbasis masyarakat. pendekatan ini lebih menekankan pada peran dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata. Melalui partisipasi masyarakat, masyarakat dapat mengembangkan pariwisata sesuai dengan kebutuhan pariwisata dan kebutuhan masyarakat. dimana dalam hal ini, masyarakat lebih memahami terkait permasalahan dan potensi pariwisata yang ada di daerahnya sehingga masyarakat juga akan memperoleh manfaat secara langsung dari pariwisata. Adanya manfaat yang diperoleh masyarakat, membuat masyarakat akan lebih optimal dalam berpartisipasi untuk pengembangan pariwisata.

2.5.2 Prinsip *Community Based Tourism*

Menurut Garrod, 2011 dalam Pantiyasa menjelaskan mengenai pendekatan yang berkaitan dengan prinsip-prinsip perencanaan dalam konteks pariwisata. pendekatan pertama menekankan pada aktor perencanaan formal yang menekankan pada keuntungan potensial ekowisata. Prinsip kedua mengaitkan pada istilah perencanaan partisipatif yang berfokus pada ketentuan dan pengaturan yang lebih menekankan pada kepekaan terhadap lingkungan alam dalam dampak pembangunan ekowisata. Dalam pengembangan *community Based tourism* masyarakat berperan langsung dalam pengembangan pariwisata. masyarakat akan mampu mengontrol dan terlibat dalam setiap pengembangan usaha pariwisata. dalam hal ini, masyarakat yang terlibat maupun tidak terlibat akan mendapatkan keuntungan dari pariwisata.

Pola Pariwisata Berkelanjutan berbasis masyarakat mengakui bahwa hak masyarakat lokal dalam mengelola kegiatan wisata di kawasan yang mereka miliki secara adat ataupun sebagai pengelola (Sulistiyadi, 2019). Beberapa aspek kunci Pariwisata Berkelanjutan berbasis masyarakat yang dikemukakan oleh Sulistiyadi, 2019 adalah :

- a. Masyarakat membentuk panitia atau lembaga untuk pengelolaan kegiatan Pariwisata Berkelanjutan dengan dukungan dari pemerintah dan organisasi masyarakat (nilai partisipasi masyarakat dan edukasi)
- b. Prinsip *local ownership* (pengelolaan dan kepemilikan oleh masyarakat setempat) diterapkan sedapat mungkin terhadap sarana dan prasarana kawasan, dan lain-lain (nilai partisipasi masyarakat)
- c. *Homestay* menjadi pilihan utama untuk sarana akomodasi di lokasi wisata (nilai ekonomi dan edukasi)
- d. Pemandu adalah orang setempat (nilai partisipasi masyarakat)
Perintisan, pengelolaan dan pemeliharaan objek wisata menjadi tanggungjawab masyarakat setempat (nilai ekonomi dan wisata)

2.6 Konsep Dasar Ekowisata

A. Pengertian Ekowisata

Menurut Eplerwood, 1999 dalam Priyambodo, dkk, 2015 menjelaskan terkait pengertian ekowisata merupakan perjalanan bertanggung jawab ke area alami dan berpetualang yang dapat menciptakan industry pariwisata.

B. Pendekatan Pengelolaan Ekowisata

Ekowisata merupakan pengelolaan yang dikelola dengan pendekatan konservasi. Destinasi yang diminati wisatawan adalah daerah alami, seperti Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Cagar Alam, Suaka Margasatwa, dan Taman Wisata (Priyambodo, dkk, 2015).

Menurut (UNEP, 1980 dalam Priyambodo, dkk, 2015) pendekatan lain ekowisata sebagai berikut:

1. Menjaga keberlangsungan proses ekologis yang tetap mendukung sistem kehidupan.
2. Melindungi keanekaragaman hayati.
3. Menjamin kelestarian dan pemanfaatan spesies dan ekosistemnya

C. Prinsip Ekowisata

The Ecotourism society (Eplerwood, 1999 dalam Priyambodo, dkk, 2015) menyebutkan delapan prinsip ekowisata sebagai berikut:

1. Mencegah dan menanggulangi dampak dari aktivitas wisatawan terhadap alam dan budaya.
2. Pendidikan konservasi lingkungan
Mendidik wisatawan dan masyarakat setempat akan pentingnya arti konservasi.
3. Pendapatan langsung untuk kawasan
Mengatur agar kawasan yang digunakan untuk ekowisata dan manajemen pengelola kawasan pelestarian dapat menerima langsung penghasilan atau pendapatan.
4. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan

Masyarakat diajak dalam merencanakan pengembangan ekowisata.

5. Penghasilan masyarakat
Keuntungan secara nyata terhadap ekonomi masyarakat dari kegiatan ekowisata mendorong masyarakat menjaga kelestarian kawasan alam.
 6. Menjaga keharmonisan dengan alam
Semua upaya pengembangan termasuk pengembangan fasilitas dan utilitas harus tetap menjaga keharmonisan dengan alam.
 7. Daya dukung lingkungan
Lingkungan alam mempunyai daya dukung yang lebih rendah dibandingkan dengan daya dukung kawasan buatan.
 8. Peluang penghasilan pada porsi yang besar terhadap negara
Apabila suatu kawasan pelestarian dikembangkan untuk ekowisata, maka devisa dan belanja wisatawan didorong sebesar-besarnya dinikmati oleh negara atau pemerintah daerah setempat.
- D. Preseden “Pengaruh Pengembangan Ekowisata Berbasis Masyarakat Terhadap Perubahan Kondisi Ekologi, Sosial Budaya Dan Ekonomi di Desa Wisata Waturaka, Daerah Penyangga Taman Nasional Kelimutu, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur (NTT)”

Desa Waturaka merupakan salah satu pintu masuk utama ke kawasan Taman Nasional Kelimutu. Desa Waturaka merupakan contoh desa yang menerapkan konsep wisata CBT (*Community Based Tourism*) di Kabupaten Ende. Adanya penerapan ekowisata memberikan beberapa perubahan pada aspek ekonomi, lingkungan dan sosial di Desa Waturaka. Adapun perubahan tersebut diantaranya ialah:

- A. Aspek Ekonomi
 1. Adanya peningkatan pendapatan masyarakat sebelum dan sesudah adanya ekowisata
 2. Meningkatkan peluang usaha bagi masyarakat setempat
 3. Meningkatkan variasi usaha baru
 4. Meningkatkan produktifitas lahan karena adanya agrowisata

B. Aspek sosial

1. Adanya peningkatan pada tingkat pendidikan
2. Masyarakat lebih mengetahui bagaimana cara mengemas daya tarik budaya menjadi suatu rangkaian aktivitas yang menarik wisatawan dan dapat menjadi kegiatan wisata yang memberikan edukasi dan pengalaman

C. Ekologi

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan seperti, pengelolaan sampah, menanam pohon dan mematuhi peraturan yang ada di kawasan untuk menjaga lingkungan.
2. Mendorong pemerintah untuk menyediakan infrastruktur yang lebih baik seperti penyediaan air bersih, listrik, telekomunikasi dan fasilitas pendukung lainnya.

2.7 Sintesa Literatur

Berikut merupakan tabel ringkasan mengenai sintesa kajian literatur dalam pembahasan kajian peran masyarakat dalam mendukung pariwisata Taman Nasional Way Kambas yang berkelanjutan:

Tabel II. 3 Sintesa Literatur

No	Aspek	Definisi	Penulis	Tahun
1	Definisi pembangunan berkelanjutan	pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang	<i>World Commission on Environment and Development (WCED)</i> dalam	1984

No	Aspek	Definisi	Penulis	Tahun
		untuk memenuhi kebutuhannya.	<i>Our Common Future</i> yang	
2	Tujuan pembangunan berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kesejahteraan masyarakat 	Emil Salim	1990
3	Definisi pariwisata berkelanjutan	pengembangan industri pariwisata dengan tetap mengacu pada keseimbangan terhadap aspek ekonomi, sosial dan lingkungan	Kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif	2012
4	Tujuan pariwisata berkelanjutan	tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu untuk mencapai keseimbangan antara lingkungan pariwisata, kebutuhan lokal masyarakat, dan kebutuhan wisatawan	Sharpley	2006
5	Manfaat pariwisata berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> • Membuka lapangan usaha • Penciptaan lapangan usaha yang layak • Daya tarik wisata dan 	Sulityadi dkk	2019

No	Aspek	Definisi	Penulis	Tahun
		penciptaan pasar <ul style="list-style-type: none"> • Pajak pendapatan 		
6	Faktor yang mempengaruhi pariwisata berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> • Perkembangan demografi • Perkembangan ekonomi • Perkembangan politik dan hukum 	Sulityadi dkk	2019
7	Aspek penting dalam pariwisata berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> • Aspek ekonomi • Aspek sosial • Aspek lingkungan 	Sulityadi dkk	2019
8	Pengertian partisipasi masyarakat	partisipasi masyarakat merupakan keikutsertaan masyarakat dalam proses mengidentifikasi masalah dan potensi yang ada dalam masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang solusi untuk menangani masalah,	Isbandi (dalam Akhmaddhian dan Fathanudien)	2015

No	Aspek	Definisi	Penulis	Tahun
		pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi		
9	Tingkat partisipasi masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Manipulation</i> 2. <i>Therapy</i> 3. <i>Informing</i> 4. <i>Consultation</i> 5. <i>Placation</i> 6. <i>Partnership</i> 7. <i>Delegated Power</i> 8. <i>Citizen Control</i> 	Arnstain	1969
10	Bentuk partisipasi masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembuatan keputusan 2. Pelaksanaan 3. Pemanfaatan hasil 4. evaluasi 	Cohen dan Uphoff	1980
11	Standar kelayakan menjadi daerah tujuan wisata	<ol style="list-style-type: none"> 1. ketersediaan prasarana umum 2. ketersediaan fasilitas umum 3. ketersediaan fasilitas pariwisata 	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata	2011

No	Aspek	Definisi	Penulis	Tahun
			Nasional Tahun 2010-2025	

Sumber : Peneliti,2019

2.8 Sintesa Variabel

Sintesa variabel menjelaskan terkait variabel-variabel yang akan digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian.

Tabel II. 4 Sintesa variabel

No	Variabel	Sub Variabel	Justifikasi	Sumber
1	Faktor internal yang berpengaruh dalam partisipasi masyarakat	Umur	Untuk menentukan karakteristik masyarakat	Yulian Sadono,2014
		Mata pencaharian		
		Tingkat pendidikan		
		Tingkat pendapatan		
		Lama tinggal		
		Tokoh masyarakat		
		Jumlah tanggungan		
2	Partisipasi dalam membuat keputusan	Menyusun rencana-rencana yang bisa dilaksanakan dan atau layak untuk dioperasikan	Merupakan bentuk partisipasi masyarakat	Cohen dan Uphoff,1980
		Kontribusi sumber daya		

No	Variabel	Sub Variabel	Justifikasi	Sumber
	Partisipasi dalam implementasi	Administrasi		
		Koordinasi kegiatan yang menyangkut tenaga kerja		
	Partisipasi dalam kegiatan memberikan keuntungan	Keuntungan material		
		Keuntungan sosial		
		Keuntungan personal		
	Partisipasi dalam kegiatan evaluasi	Evaluasi langsung		
Evaluasi tidak langsung				
3	Aspek ekonomi dalam pariwisata berkelanjutan	Kesempatan bekerja	Merupakan tiga aspek penting dalam pencapaian pembangunan pariwisata berkelanjutan	Sulistiyadi dkk,2019
Perubahan tingkat pendapatan				
4	Aspek sosial dalam pariwisata berkelanjutan	Menghormati keaslian budaya masyarakat setempat		
		Melestarikan nilai-nilai budaya		
5	Aspek lingkungan dalam pariwisata berkelanjutan	Memfaatkan secara optimal sumber daya lingkungan		

No	Variabel	Sub Variabel	Justifikasi	Sumber
		Mempertahankan proses ekologi		
		Pelestarian warisan alam dan keanekaragaman hayati		
6	Fasilitas umum	Fasilitas keamanan	Untuk mengetahui potensi dan permasalahan di TNWK berdasarkan standar kelayakan daerah tujuan wisata	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025
		Fasilitas keuangan		
		Fasilitas bisnis		
		Fasilitas kesehatan		
		Fasilitas sanitasi dan kebersihan		
		Fasilitas khusus bagi penderita cacat fisik, anak-anak, dan lanjut usia		
		Taman bermain		
		parkir		
		Fasilitas ibadah		
7	Prasarana umum	Jaringan air bersih		
		Jaringan listrik		
		Lampu penerangan		
		Jaringan drainase		
		System persampahan		
8	Fasilitas pariwisata	Fasilitas akomodasi		
		Fasilitas rumah makan		
		Pusat informasi pariwisata		
		Polisi kepariwisataan		

		Toko cendramata	
		Petunjuk arah/papan informasi	
		Bentuk bentang alam	
	Tata kelola pariwisata Taman Nasional	Pemerintah atau mitra-mitra yang terlibat dalam pengembangan pariwisata Taman Nasional	Permen RI No. 28 Tahun 2011 tentang tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Konservasi Pelestarian Alam
		Sumber pendanaan kawasan Taman Nasional	

Sumber : Peneliti,2019